

ABSTRAK

Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sering terjadi kesalahpahaman terhadap fungsi dan wewenang dari Peradilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang menimbulkan banyak spekulasi dari berbagai pihak baik dari masyarakat umum hingga paka-pakar hukum. Dengan demikian, perlu dikaji bagaimana peradilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam sistem peradilan di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian normatif, karena ditujukan pada Undang-undang, sehingga erat kaitannya dengan perpustakaan. Selain itu, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan cara mengkaji semua Undang-undang dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

Perselisihan pendapat terhadap tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini terjadi Karena Undang-undang tidak mengatur secara jelas bagaimana tata cara peradilan yang ada di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran dari berbagai pihak. Selain itu, Undang-undang Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum pernah dilakukan perubahan sejak pertama kali di sahkan pada tahun 1999, sehingga berbagai penafsiran tentang sistem peradilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang muncul tidak mendapat penjelasan yang jelas.

Kata Kunci: Karakteristik, KPPU, Peradilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	6
1.3 TUJUAN	6
1.4 KEGUNAAN	7
1.4.1. Kegunaan Teoritis	7
1.4.2. Kegunaan Praktis	7
1.5 KEASLIAN.....	7
1.6 METODE PENELITIAN.....	9
1.6.1. Jenis Penelitian.....	9
1.6.2. Metode Pendekatan	10
1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum	12
BAB II STRUKTUR DAN FUNGSI LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA	14
2.1. Lembaga Peradilan Di Indonesia.....	14
2.2 Pengaturan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia	16
2.3 Jenis-jenis Peradilan di Indonesia	17
2.3.1. Peradilan Umum.....	17
2.3.2. Peradilan Khusus.....	22
2.4. Peradilan Tingkat Banding	29

2.4.1. Pengaturan Hukum Acara Peradilan Tingkat Banding	29
2.4.2. Fungsi Peradilan Tingkat Banding.....	31
BAB III KUALIFIKASI KPPU SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN DAN UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN KPPU	33
3.1. Hukum Acara Peradilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha	33
3.2. Upaya Hukum Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha	45
BAB IV PENUTUP	56
4.1. Kesimpulan.....	56
4.2. Saran	57
Daftar Pustaka	58
BIODATA PENULIS	61